

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mencoba mengulas konsep lembaga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia dengan melihat konsep Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, komposisi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta melihat perbedaan kedudukan dan konsep dalam memberikan nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi dokumen yaitu peraturan perundang-undangan serta literature dan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diolah menggunakan metode analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga ini (Wantimpres Keberadaan Dewan Pertimbangan Agung ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945, DPA berkedudukan sebagai organ tinggi negara yang sejajar dengan Presiden. Dengan adanya perubahan menjadi dewan pertimbangan presiden tidak lagi sebagai lembaga tinggi Negara, dimana secara konsep kedua lembaga ini memiliki perbedaan yang dulunya sebagai lembaga tinggi negara tapi sekarang berada di bawah lembaga kepresidenan. Implikasi dari Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden perubahan ini dapat merusak sistem ketatanegaraan di Indonesia di sebabkan perubahan ini tidak substantif terhadap kebutuhan dalam rangka perbaikan sistem ketatanegaraan

Kata Kunci : Dewan Pertimbangan Presiden, Implikasi Yuridis, Perubahan Lembaga

### **ABSTRACT**

*This research tries to review the concept of the Presidential Advisory Council (Wantimpres) institution in the Indonesian Constitutional Structure by looking at the concept of the Presidential Advisory Council (Wantimpres) with the Supreme Advisory Council (DPA) in the Indonesian constitutional structure, the composition of the members of the Presidential Advisory Council (Wantimpres) and seeing the differences in position and conspiracy in providing advice and consideration of the Presidential Advisory Council (Wantimpres) in the Indonesian constitutional structure. This research is a library research through a statute approach and historical approach. This research uses data collection methods in the form of document studies, namely legislation and literature and data obtained from library research are processed using analytical methods.*

*The results of this study indicate that this institution (Wantimpres) The existence of the Supreme Advisory Council of Indonesian state administration before the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, DPA is positioned as a high state organ parallel to the President. With the change to the Presidential Advisory Council, it is no longer a high state institution, where conceptually these two institutions have differences that used to be a high state institution but are now under the presidential institution. The implications of the Amendment to Law Number 19 of 2006 concerning the Presidential Advisory Council of this change can damage the constitutional system in Indonesia because this change is not substantive to the needs in the improvement of the constitutional system.*

*Keywords: Presidential Advisory Council, Juridical Implications, Institutional Changes*